



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Ilahi Robbi atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance berdasarkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak lepas dari kerja keras seluruh karyawan karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, untuk itu tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih, yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan Program dan Kegiatan selama tahun 2021 sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam penyusunan laporan ini.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini yang merupakan evaluasi rincian seluruh pekerjaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran sehingga sudah pasti banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan kedepan.

Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Timur tentang pelaksanaan tugas selama 1 tahun sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan.

Selong, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Timur,



M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 19760701 200901 1 005
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR GRAFIK	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Umum Kab.Lombok Timur	2
1.2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	2
1.2.2. Kondisi Topografi	2
1.2.3. Kondisi Demografi	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi	16
C. Permasalahan dan Solusi	22
D. Sistematika Penyajian	23
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24
B. Perjanjian Kinerja	29
III. AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Realisasi Anggaran	32
IV. PENUTUP	32
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.	Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan	19
2.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	20
3.	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	20
4.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
5.	Jumlah Pegawai Sesuai Bidang Tugasnya	21
6.	Sasaran Program dan Kegiatan tahun 2021	25
7.	Indikator Kinerja Utama	26
8.	Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan	30
9.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dan tahun 2020	31
10.	Realisasi Anggaran 2021(DAU/DAK).....	33
11.	Realisasi Anggaran 2021 Tugas Pembantuan (TP)	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	38
2. Alokasi dan Reaisasi Anggaran Tahun 2021 Dana Tugas Pembantuan (TP)	41
3. Formulir Pengukuran Kinerja	43
4. Pencapaian Kinerja Keuangan	44
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	

DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	11

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan Visi dan Misi yang di emban maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap.
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatkan Produksi Hasil Olahan Perikanan.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.
3. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

C. Permasalahan dan Solusi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Keberadaan Data di Bidang Kelautan dan Perikanan belum memadai.
2. Penguasaan teknologi budidaya ikan yang belum optimal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan
5. Tingginya harga pakan tidak sebanding dengan nilai harga jual ikan.
6. Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan keragaman produk olahan kelautan dan perikanan yang bernilai tambah.

Melihat dari permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan akurasi data setiap tahun (dengan membuat buku statistik perikanan secara berkelanjutan).
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya ikan.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan.
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan.
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan tentang cara pembuatan pakan.
6. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar.

D. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya sebesar Rp. 3.114.350.132,- (97,82%) keuangan dan fisik (97,82%).
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya sebesar Rp.1.330.588.700,- (88,68%) keuangan dan fisik (100%).
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya sebesar Rp.1.710.928.000,- (87,92%) keuangan dan fisik (100%).
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya sebesar Rp.47.899.724,- (11,33%) keuangan dan fisik (11,33%).

E. Hasil Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi internal, maka pelaksanaan kinerja kegiatan termasuk **Kategori Baik** dimana rata-rata pencapaian kinerja sudah mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun realisasi keuangan mencapai Rp. 6.203.591.731,- (87,96%) dan realisasi fisik (94,60%)(dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.052.787.972,- dari sumber dana (DAU/DAK). Sedangkan dari sumber dana Tugas Pembantuan (TP) realisasi keuangan sebesar Rp. 1.499.112.200,- (97,01%) dan fisik (100%) dari pagu anggaran Rp. 1.545.313.000,-

Selong, 24 Januari 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Lombok Timur


M. ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 19760701200901 1 005
Pembina (IV/a)

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.1.1. Dasar Hukum

Sebagaimana kita telah ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur

1.2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok dengan ibu kota di Selong mempunyai wilayah seluas 2.679,88 km² yang terbagi atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%), dan wilayah laut seluas 1.074,33 km² (44,09%) dengan panjang pantai 220 km. Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116^o-117^o Bujur Timur (BT dan 8^o-9^o Lintang Selatan (LS) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah dan Kab.Lombok Utara
- Sebelah Timur : Selat Alas

Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 21 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 239 Desa (6 Kecamatan dengan 38 Desa/Kelurahan yang termasuk daerah pesisir) yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil (Gili) sebanyak 39 Gili, diantara gili-gili tersebut, terdapat 4 gili yang berpenghuni yaitu : Gili Maringkik, Gili Belek, Gili Reed an Gili Ujung Betok.

1.2.2. Kondisi Topografi

Secara Topografi Kabupaten Lombok Timur terbagi menjadi 4 bagian antara lain :

1. Bagian Utara merupakan dataran tinggi, daerah pegunungan (kawasan gunung renjani) yang sebagian besar merupakan areal hutan, sedangkan kondisi pesisir pantainya landai dan berpotensi untuk pengembangan wisata bahari (terumbu karang, mangrove) dan pertambakan.
2. Bagian Tengah merupakan hamparan dataran rendah yang subur dengan dimniasi pemanfaatan adalah persawahan. Pemukiman, lokasi konsentrasi usaha-usaha pertanian dan lain-lain, dengan kondisi pesisir pantainya landau berpotensi untuk pengembangan areal pertambakan.
3. Bagian Selatan bergelombang dan berbukit-bukit, pesisir pantai landau sampai curang (tebing) dengan pasir putih, potensi untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.

4. Bagian Timur, Utara dan Selatan yang merupakan tepian pantai memiliki ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan laut, semakin kebagian tengah/ kedalaman kedudukan tanah semakin meninggi hingga ke puncak gunung renjani yang mencapai ketinggian 3.775 meter.

1.2.3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur menurut data statistik tahun 2020 sebanyak 1.325.240 jiwa yang terdiri dari laki-laki 659.517 jiwa dan perempuan 665.723 Jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 383.810 jiwa (28,96%) hidup menyebar pada 48 (desa/kelurahan pantai) di 6 kecamatan pantai/pesisir antara lain Kec. Lab.Haji, Kec.Sakra Timur, Kec.Keruak, Kec.Jerowaru, Kec.Pringgabaya dan Kec.Sambelia. Sedangkan penduduk yang berusaha/bekerja di bidang Kelautan dan Perikanan antara lain nelayan sebanyak 13.712 jiwa, pembudidaya sebanyak 5.381 RTP yang terdiri dari petambak 85 RTP, pembudidaya ikan air tawar (kolam) 2.817 RTP, budidaya karamba jaring apung 1.809 RTP, budidaya minapadi 150 RTP, budidaya rumput laut 520 RTP dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Unit Pengolahan Ikan/UPI) besar menengah sebanyak 14 RTP dan UPI mikro kecil sebanyak 2.873 RTP.

Sedangkan luas lahan potensi tambak garam di Kab.Lombok Timur sebesar 1.385,13 ha yang terdiri dari lahan tidak produktif 1.091,78 ha, lahan produktif 293,35 ha, lahan produksi pugar 243,88 ha dan lahan produksi non pugar 49,47 ha. Pada kondisi cuaca normal luasan tambak garam yang ada mampu memproduksi garam sebanyak 25-30 ton/ha/siklus dengan sistem tradisional, sedangkan untuk sistem ulir dan geo membran produksi yang dihasilkan untuk satu hektar/siklus antara 60-70 ton/ha/siklus.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Pada pasal 2 dinyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangannya kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB III pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2021 tersebut yaitu :

1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas; terdiri atas :
 1. Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas :
 1. Seksi Perizinan Perikanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas :
 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik usaha Perikanan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

I. Sekretariat

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

- a. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan system informasi;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas.

II. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil.

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
- Penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
- Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
- Pengordinasian pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam daerah;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi :

- a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumberdaya alam yang dapat diusahakan dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam daerah;
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil;

- Persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam daerah.
- b. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengelola perikanan budidaya; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Membawahi :

- a. Seksi Perizinan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah;
 Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - Pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - Penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil;
- Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
 - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya;

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- Penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.
- b. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - Penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan ;
 - Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Membawahi :

a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi supplier hasil perikanan;

- Penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
 - Penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;
 - Penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;
 - Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayagunaan teknologi, logistik usaha perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air tawar.

2. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air payau dan laut.
3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan ikan diwilayah kerjanya.

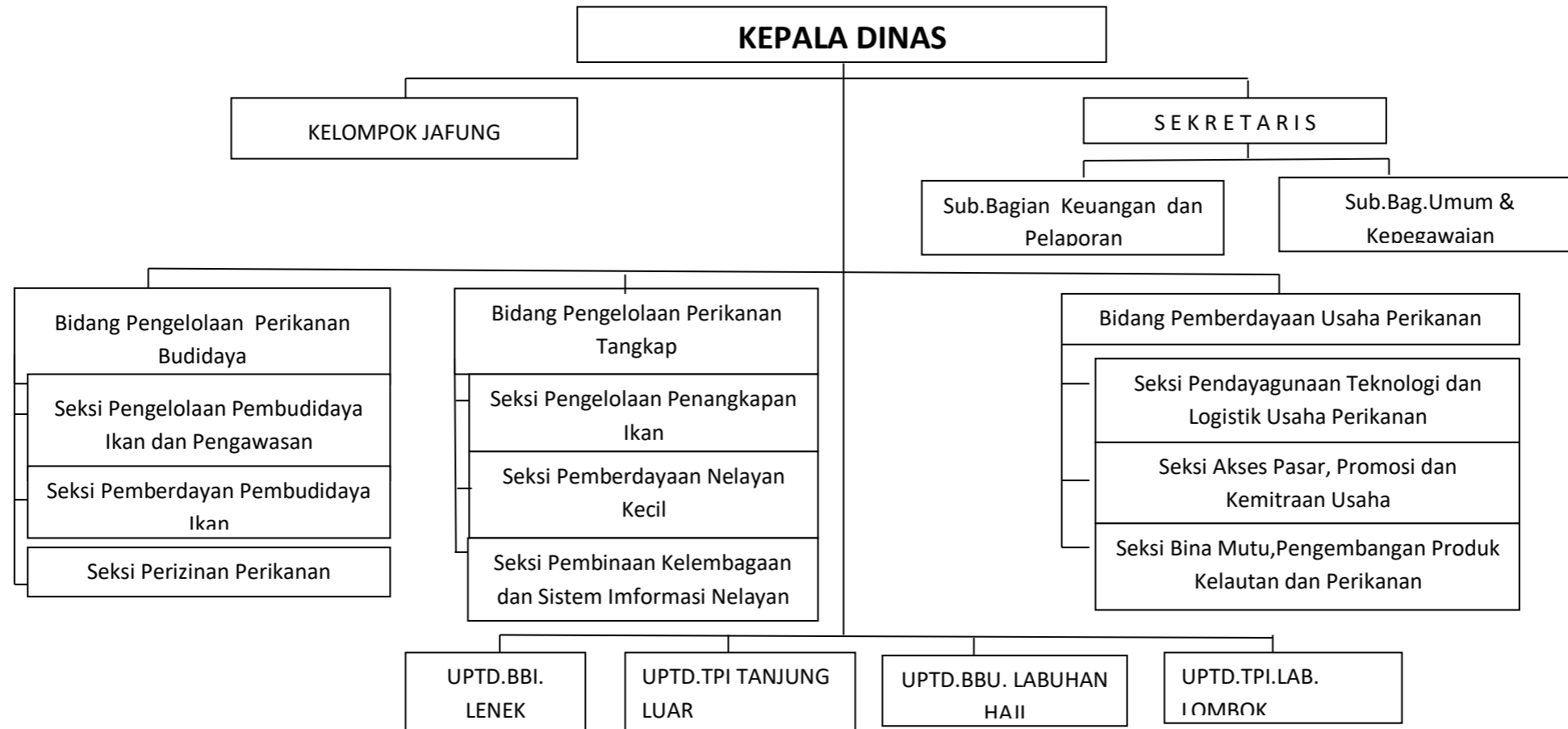
Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

1. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya air tawar.
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air tawar.
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian.
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya air tawar.
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah.
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budiday perikanan air tawar.
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang budidaya perikanan air tawar diwilayah kerjanya.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Mempunyai Tugas:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - c. Pengujian dan penerapan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut;

- d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air payau dan laut yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan air payau dan laut
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang budidaya perikanan air payau dan laut diwilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yng diberikanan oleh atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Tempat pelelangan Ikan (TPI) Mempunyai Tugas :
- a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan pendaratan kapal dan hasil tangkapan nelayan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - f. Pelaksanaan pembinaan , pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang pelelangan ikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yng diberikanan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, maka Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur seperti pada table berikut ini.

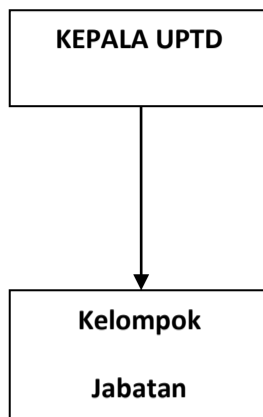


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur antara Lain :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Perikanan
 - b. Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil
 - c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari
 - a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
 - a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha
 - c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek
 - b. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Lab.Haji
 - c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lab.Lombok

Sedangkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yaitu :



Gambar 1.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Data Personil :

Tabel 1. Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol	Pendidikan Formal	Ket.
1.	Kepala Dinas	1	Pembina (IV/a)	S2	Perikanan
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
5.	Kepala Bidang PUP	-	-	-	-
6.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penata (III/c)	S1	Administrasi Pemerintahan
7.	Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
8.	Kepala Seksi Perizinan Perikanan	1	Penata (III/c)	Si	Peternakan
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	1	Penata (III/c)	S1	Hukum
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	1	Penata (III/c)	S2	Pertanian
13.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Sosial
14.	Kepala Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Administrasi Pemerintahan
15.	Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Administrasi
16.	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan

	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol.	Pendidikan Formal	Ket.
17.	Kepala BBI Lokal Lenek	1	Pembina (IV/a)	S2	Perikanan
18.	Kepala BBIP Lab.Haji	1	Penata Tk.I (III/d)	DIII	Administrasi

19.	Kepala TPI Tanjung Luar	1	Penata Muda Tk I (III/b)	S1	Administrasi Pemerintahan
20.	Kepala TPI Lab.Lombok	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan
	Jumlah	19			

Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Seksi	9
5.	Kepala Sub.Bagian	2
6.	Kepala UPTD	4

Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV)	6
2.	Penata (III)	17
3.	Pengatur (II)	2

Tabel 4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata II (S2)	3
2.	Strata I (S1)	19
3.	DIII	1
4.	SLTA	2

Tabel 5. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur sesuai Bidang Tugas

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1.	Kepala Dinas	1								1	

2.	Sekretaris			1						1	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya			1						1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			1						1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan										
6.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian					1				1	
7.	Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan						1				1
8.	Kepala Seksi Perizinan Perikanan					1				1	
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil					1				1	
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan					1				1	
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan					1				1	
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil					1				1	
13.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil						1				1
14.	Kepala Seksi Bina Mutu,Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan						1				1
15.	Kepala Seksi Akses Pasar,Promosi dan Kemitraan Usaha						1				1

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
16.	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik					1				1	

	Usaha Perikanan									
17.	Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek				1				1	
18.	Kepala Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Lab.Haji				1				1	
19.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lab.Lombok				1				1	
20.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar				1				1	
21.	Staf						4	2	4	2
JUMLAH		1	3		11	4	4	2	19	6

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Keberadaan Data di Bidang Kelautan dan Perikanan belum memadai
2. Penguasaan Teknologi Budidaya Ikan yang belum optimal
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan
5. Tingginya harga pakan tidak sebanding dengan nilai harga jual ikan
6. Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan keragaman produk olahan Kelautan dan Perikanan yang bernilai tambah

Melihat dari permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan akurasi data setiap tahun (dengan membuat buku statistik perikanan secara berkelanjutan)
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya ikan.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan.
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan tentang cara pembuatan pakan
6. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, data organisasi, permasalahan dan solusi serta sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan rencana strategis tahun 2019-2023 dan perjanjian kinerja 2021 Dinas kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan simpulan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dan langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa mendatang

BAB IV. PENUTUP

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2021 dan strategi peningkatan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

1. Pernyataan VISI

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023 adalah **“Lombok Timur Yang Adil Sejahtera dan Aman”**

Lombok Timur Adil :bermakna perlakuan terhadap masyarakat di kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu, karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatuhan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera :bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman :bermakna bahwa pembangunan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak difabel dan masyarakat miskin.

2. Pernyataan MISI

Dalam rangka Mewujudkan Visi untuk membangun Kabupaten Lombok Timur di tetapkan 6 (Enam) Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur 2019-2023, yang terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan terdapat pada Misi ke tiga yaitu : Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

3. Tujuan

- a. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap.
- b. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya.
- c. Meningkatkan Produksi Hasil Olahan Perikanan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur adalah Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang merupakan ukuran

kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, yaitu :

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
- b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya
- c. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

5. Sasaran Program

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dan mencerminkan berfungsinya outcome dari sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan yaitu :

Tabel 6. Sasaran Program dan Kegiatan tahun 2021

NO.	SASARAN PROGRAM	NO.	SASARAN KEGIATAN
I.	Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas-tugas Dinas	1.1.	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
		1.2.	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi Keuangan
		1.3.	Terlaksananya Kegiatan Penataan Administrasi BMD
		1.4.	Terlaksananya Kegiatan Penataan Adminitrasi Umum
		1.5.	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan BMD
		1.6..	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
		1.7.	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Perijinan Kendaraan Dinas
II.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	2.1.	Terlaksananya Kegiatan Pendataan Sumberdaya Ikan
		2.2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
		2.3.	Tersedianya Biaya Operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
III.	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.1.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan
IV.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	4.1.	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
		4.2.	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Bagi Pengolah dan Pemasar

6. Indikator Kinerja Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dijabarkan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu.

Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (Outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (Output).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah :

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	61.142 ton

7. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur, yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2021 sebanyak 3 Program teknis dan 1 Program Penunjang yang termasuk didalam anggaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (DAU/DAK). Sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan (TP) ada 1 Program dan 1 kegiatan.

a. Program Teknis (DAU/DAK) :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

b. Program Penunjang (DAU/DAK) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 sebanyak 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan teknis antara lain adalah :

1. Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
2. Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan
 - Sub Kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
6. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penunjang sebanyak 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan antara lain adalah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sedangkan Kegiatan teknis untuk Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah 1 program dan 1 kegiatan antara lain :

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan output administrasi kegiatan usaha garam rakyat dan bantuan sarana dan prasarana usaha garam rakyat untuk pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR).

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan

Perikanan Kab.Lombok Timur tahun 2021 merupakan bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dengan Bupati Lombok Timur.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan.

Target sasaran program dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	61.142 ton

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Kerangka Pengukuran kinerja berupa indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan bersifat nyata serta terukur.

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yaitu :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2021 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 - 2023, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam pengukuran dan capaian keberhasilan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan indikator kinerja berupa peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam tahun 2021 melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut :

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Poduksi Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	61.142	66.946,18	109,49

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 maka dijabarkan

sebuah tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2020 dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Reallisasi Kinerja tahun 2020 dengan tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)					
			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	Ton	60.592	60.041,89	99,09	61.142	66.946,18	109,49

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolok ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya dan meningkatnya konsumsi ikan. Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur untuk capaian peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dari target sebesar 61.142 ton telah tercapai sebesar 66.946,18 ton atau naik sebesar (109,49%), ini disebabkan karena adanya bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan sarana dan prasarana budidaya yang diberikan kepada masyarakat dan juga iklim sangat mendukung dalam meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Dalam penetapan target kinerja tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya semaksimal mungkin diantaranya adanya penghematan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta memaksimalkan sumberdaya manusia yang jumlahnya sangat terbatas guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur memiliki anggaran APBD antara lain belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 7.052.787.972,- dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 6.203.591.731,- (87,95%) dan realisasi fisik (94,59%) sisa anggaran sebesar Rp. 849.196.241,- terdiri dari Hutang Jatuh Tempo sebesar Rp. 364.536.000,- dana yang tidak terserap sebesar Rp. 381.000.000,- (Dana Aspirasi) jadi sisa anggaran sebesar Rp. 103.660.241,- terdiri dari sisa Gaji, TPP dan insentif sebesar Rp. 60.851.669,- dan sisa kontrak, tender sebesar Rp. 42.808.572,-

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 memiliki 5 program yang terdiri dari 4 program teknis dan 1 program penunjang yang berasal dari DAU/DAK dan Dana Tugas Pembantuan (TP) dan 14 kegiatan teknis dan penunjang, 24 sub kegiatan teknis dan penunjang baik yang sumber dananya dari DAU/DAK dan Tugas Pembantuan, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pelaksana tugas desentralisasi pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lombok Timur. Program kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana program-program yang dimiliki efek langsung dalam pencapaian target kinerja yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan dimana ke 4 program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator penunjang produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan tingkat konsumsi ikan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja meliputi output dan outcome.

Selanjutnya Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2021 telah melaksanakan program kegiatan yang sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 4 program dan 13 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp.

7.052.787.972,- yang terdiri belanja Gaji sebesar Rp. 2.500.937.778,- dan belanja Non Gaji/Program dan Kegiatan sebesar Rp. 4.551.850.194,-
Sedangkan program kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1 program dan 1 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.545.313.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.499.112.200 (97,01%) dan realisasi fisik sebesar (100%). Adapun rinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 10. Realisasi Anggaran tahun 2021 (DAU/DAK)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.183.798.903	3.114.350.132	97,82	97,82
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.195.900	72.628.900	99,22	99,22
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.195.900	72.628.900	99,22	99,22
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.689.301.278	2.628.449.609	97,74	97,74
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.937.778	2.440.086.109	97,56	97,56
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.363.500	188.363.500	100,0	100,0
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	804.600	804.600	100,0	100,0
	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	804.600	804.600	100,0	100,0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.557.600	82.042.450	97,02	97,02
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.810.000	2.810.000	100,0	100,0
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.565.000	15.431.000	99,14	99,14
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.799.000	1.801.000	47,41	86,89
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.056.600	6.053.000	99,94	100,0
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.327.000	55.947.450	99,33	100,0
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.945.000	39.945.000	100,0	100,0
	a. Pengadaan Peralatan	39.945.000	39.945.000	100,0	100,0

		dan Mesin Lainnya				
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		172.107.200	169.380.008	98,41	100,0
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.647.200	60.326.700	99,47	100,0
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	41.700.000	39.298.308	94,24	100,0
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.760.000	69.755.000	99,99	100,0
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		123.887.325	121.099.565	97,75	100,0
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.847.325	103.070.565	97,38	100,0
	b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000	8.030.000	99,87	100,0
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.999.000	99,99	100,0
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		1.500.344.700	1.330.588.700	88,68	100,0
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		37.140.700	37.120.700	99,95	100,0
	a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	37.140.700	37.120.700	99,95	100,0
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.374.000.000	1.204.264.000	87,65	100,0
	a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.374.000.000	1.204.264.000	87,65	100,0
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		89.204.000	89.204.000	100,0	100,0
	a.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	89.204.000	89.204.000	100,0	100,0

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Ket.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92	100,0
1.	Pengelolaan Pembudidaya	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92	100,0

	Ikan					
	a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	1.801.701.000	1.570.212.500	87,15	100,0
	b.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.218.470	140.715.500	97,57	100,0
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		422.724.899	47.899724.	11,33	11,33
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		25.729.899	25.729.899	100,0	100,0
	a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.729.899	25.729.899	100,0	100,0
2.	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		396.995.000	21.995.000	5,54	5,54
	a.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.995.000	21.995.000	5,54	5,54
JUMLAH			7.052.787.972	6.203.591.731	87,96	94,60

Tabel 11. Realisasi Anggaran tahun 2021 Tugas Pembantuan (TP)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)	
			Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	
I.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan					
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan					
	a.	Administrasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat	435.000.000	398.119.200	91,52	100,0
	b.	Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha garam Rakyat	1.110.313.000	1.100.993.000	99,16	100,0
JUMLAH			1.545.313.000	1.499.112.200	97,01	100,0

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui Rencana Strategis dan rencana kerja tahun 2021 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form pencapaian sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dari indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu : Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dapat mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan yaitu untuk peningkatan produksi perikanan tangkap mencapai 66.946,18 ton dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 61.142 ton jadi ada peningkatan sebesar 109,49%

B. Saran

Dengan penguatan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk :

1. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama dimasa mendatang.
2. Dukungan pihak legislatif agar sasaran dan program Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 (DAU/DAK)

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.183.798.903	3.114.350.132	97,82	97,82
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.195.900	72.628.900	99,22	99,22
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.195.900	72.628.900	99,22	99,22
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.689.301.278	2.628.449.609	97,74	97,74
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.500.937.778	2.440.086.109	97,56	97,56
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	188.363.500	188.363.500	100,0	100,0
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	804.600	804.600	100,0	100,0
	a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	804.600	804.600	100,0	100,0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.557.600	82.042.450	97,02	97,02
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.810.000	2.810.000	100,0	100,0
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.565.000	15.431.000	99,14	99,14
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.799.000	1.801.000	47,41	86,89
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.056.600	6.053.000	99,94	100,0
	e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.327.000	55.947.450	99,33	100,0
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.945.000	39.945.000	100,0	100,0
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.945.000	39.945.000	100,0	100,0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.107.200	169.380.008	98,41	100,0
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.647.200	60.326.700	99,47	100,0
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	41.700.000	39.298.308	94,24	100,0
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.760.000	69.755.000	99,99	100,0

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Ket.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.887.325	121.099.565	97,75	100,0
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.847.325	103.070.565	97,38	100,0
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000	8.030.000	99,87	100,0
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	9.999.000	99,99	100,0
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.500.344.700	1.330.588.700	88,68	100,0
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.140.700	37.120.700	99,95	100,0
	a. Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	37.140.700	37.120.700	99,95	100,0
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.374.000.000	1.204.264.000	87,65	100,0
	a. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	1.374.000.000	1.204.264.000	87,65	100,0
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	89.204.000	89.204.000	100,0	100,0
	a. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	89.204.000	89.204.000	100,0	100,0
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92	100,0
1.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92	100,0
	a. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	1.801.701.000	1.570.212.500	87,15	100,0
	b. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.218.470	140.715.500	97,57	100,0

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Ket.
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	422.724.899	47.899724.	11,33	11,33
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.729.899	25.729.899	100,0	100,0
	a. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	25.729.899	25.729.899	100,0	100,0
2.	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.995.000	21.995.000	5,54	5,54
	a. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	396.995.000	21.995.000	5,54	5,54
JUMLAH		7.052.787.972	6.203.591.731	87,96	94,60

Lampiran 2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 Dana Tugas Pembantuan (TP)

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
	a. Administrasi Kegiatan Usaha Garam Rakyat	435.000.000	398.119.200	91,52	100,0
	b. Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha garam Rakyat	1.110.313.000	1.100.993.000	99,16	100,0
	JUMLAH	1.545.313.000	1.499.112.200	97,01	100,0

Lampiran 3. Formulir Pengukuran Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Keterangan
			Target	Realisasi	%	
1.	Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan	- Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya	61.142 ton	66.946,18	109,49 %	

Lampiran 4. Pencapaian Kinerja Keuangan

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran : 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI		(Rp.)	(%)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	100 %	100 %	3.183.798.903	3.114.350.132	97,82
	Perencanaan , Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan	100 %	100 %	73.195.900	72.628.900	99,22
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian knierja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan	3 dokumen	3 dokumen	73.195.900	72.628.900	99,22
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Pesentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100 %	100 %	2.689.301.278	2.628.449.609	97,74
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN	13 bln	13 bln	2.500.937.778	2.440.086.109	97,56
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujain/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan	12 bln	12 bln	188.363.500	188.363.500	100,0
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daeah	100 %	100 %	804.600	804.600	100,0
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah dokumen BMD	1 dokumen	1 dokumen	804.600	804.600	100,0

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI		(Rp.)	(%)
	Administrasi umum perangkat daerah	Pesentase terlaksananya pelyanan umum perangkat daerah	100 %	100 %	84.557.600	82.042.450	97,02
	Penyediaan komponen intlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik	5 jenis	5 jenis	2.810.000	2.810.000	100,0
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat tulis kantor	31 jenis	31 jenis	15.565.000	15.431.000	99,14
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat kebersihan kantor	16 jenis	16 jenis	3.799.000	1.801.000	47,41
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetak dan pengadaan	4 jenis	4 jenis	6.056.600	6.053.000	99,94
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	56 kl	56 kl	56.327.000	55.947.450	99,33
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyelesaian pengadaan aset direncanakan	100 %	100 %	39.945.000	39.945.000	100,0
	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan pelengkapan kantor	4 jenis	4 jenis	39.945.000	39.945.000	100,0
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase capaian layanan jasa penunjang	100 %	100 %	172.107.200	169.380.008	98,41
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	1200 surat	1200 surat	60.647.200	60.326.700	99,47
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah tagihan terbayar	12 bln	12 bln	41.700.000	39.298.308	94,22
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kepegawaian	12 bln	12 bln	69.760.000	69.755.000	99,99

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI		(Rp.)	(%)
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	123.887.325	121.099.565	97,75
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan	41 unit	41 unit	105.847.325	103.070.565	97,38
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah pemeliharaan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	8.040.000	8.030.000	99,87
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 paket	10.000.000	9.999.000	99,99
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan produksi perikanan tangkap	16.350 ton	16.350 ton	1.500.344.700	1.330.588.700	88,68
	Pengelolaan penangkapan ikan wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat di usahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya darat sumber daya ikan	100 %	100 %	37.140.700	37.120.700	99,95
	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan	Jumlah laporan	5 laporan	5 laporan	37.140.700	37.120.700	99,95
	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota	Tersaluranya bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada masyarakat	100 %	100 %	1.374.000.000	1.204.264.000	87,65
	Pengembangan kapasitas nelayan kecil	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan yang diadakan	28 paket	28 paket	1.374.000.000	1.204.264.000	87,65

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI		(Rp.)	(%)
	Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Terselenggaranya pelayanan TPI	100 %	100 %	89.204.000	89.204.000	100,0
	Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	Jumlah biaya operasional	12 bln	12 bln	89.204.000	89.204.000	100,0
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan budidaya	44.792 ton	44.792 ton	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92
	Pengelolaan pembudidaya ikan	Tersalurkannya bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan kepada masyarakat	100%	100%	1.945.919.470	1.710.928.000	87,92
	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah prasarana pembudidaya ikan yang diadakan	30 paket	30 paket	1.801.701.000	1.570.212.500	87,15
	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah ketersediaan sarana pembudidaya ikan yang diadakan	7 jenis	7 jenis	144.218.470	140.715.500	97,57
IV	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	30 %	30 %	422.724.899	47.724.899	11,33
	Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Cakupan kelompok pengolah dan pemasar yang diberdayakan	100 %	100 %	25.729.899	25.729.899	100,0
	Pelaksanaan bimbingan dan penetapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang dibina	20 klp	20 klp	25.729.899	25.729.899	100,0

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN (Rp.)	REALISASI KEUANGAN	
		URAIAN	TARGET	REALISASI		(Rp.)	(%)
	Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Terselurnya bantuan fasilitas bagi pengolah dan pemasar	100 %	100 %	396.995.000	21.995.000	5,54
	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah kali pembinaan stanting yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	396.995.000	21.995.000	5,54
	JUMLAH :.....				7.052.787.972	6.203.591.731	87,96

Selong, 24 Januari 2021
 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
 Kabupaten Lombok Timur



